

Awas Proyek Infrastruktur Air, Operasi Pemodal

Water sector project dalam skenario *infrastruktur summit (Jakarta 17-18 Januari 2005)*. Selain menencanakan

dan

Roads Transportation,

juga ada sektor air berupa pembangunan waduk dan proyek dam/bendungan air. Namun perlu dicermati terkait pembiayaan jebakan hutang luar negeri dan rentan timbulkan dehumanisasi.

Dalam skenario Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jatim yang telah disahkan DPRD Provinsi Jatim. Ada 21 proyek waduk master plan dan dua detail desain. Diantaranya meliputi Kab. Ngawi, Bojonegoro, Ponorogo, Madiun, Jombang, Nganjuk, Madura. Untuk kemandirian sektor air, demi ketersediaan dan pemenuhan air untuk masyarakat menjadi pertimbangan utama. Tetapi sayangnya hal ini tidak terbukti.

Selain alasan dan dampak positif untuk masyarakat di satu sisi, dampak yang multidimensi dan kompleksitas di sisi lain seringkali diderita rakyat saat proyek air ini dilakukan. Ada fase-fase proyek yang akan membawa dinamika persoalan sosial ketika proyek pembangunan waduk/bendungan, pipanisasi air dilakukan.

Dimensi

persolannya meliputi fase

sebelum, pada saat dan pada saat

proyek dimulai.

Sebelum proyek dimulai. Proses pembebasan tanah sering ada pola negosiasi yang tidak seimbang, penjelasan informasi sepihak atas nilai manfaat apa yang akan didapat masyarakat sekitar. Dan saat ada penolakan bisa mengundang hadirnya kekerasan bagi yang menolak dengan pengambilan tanah secara paksa, pengusiran rakyat dari tanah tinggal dan penghidupannya, sampai manifestasi cara-cara kekerasan psikis melalui ancaman, teror, dan lainnya. Sebagaimana yang terjadi pada proyek berdarah di Kedungombo, Wadas Lintang Wonosobo, Waduk Nipah Madura. Maupun penolakan masyarakat Madura di sekitar waduk Blega beberapa waktu yang lalu.

“ Dam Waduk Proyek Padat Modal Dan Jebakan Hutang

Banyak proyek baru yang akan di danai melalui hutang luar negeri, contohnya Waduk Blega-Bangkalan yang ada dalam RTRW Jatim. Seperti halnya yakni proyek waduk

â€œberdarahâ€ Nipah Madura, adalah salah satu project hutang yang didanai oleh JBIC (*Japan Bank for International Corporation*)

. Dan beberapa proyek lainnya seperti di Madiun, Magetan, Bojonegoro akan dibiayai dana hasil hutang luar negeri. Berdasarkan data yang terhimpun, bahwa seluruh proyek yang dikemas dalam

water recources

di Jatim akan di alokasikan sebagian dari dana hutang luar negeri sebesar 5.096,55 miliar dollar AS

(*sumber US Embassy:infrastructure summit*).

Hutang luar negeri di sektor air, termasuk ***Dam Project dan Power Energy*** yang dilakukan Indonesia dari dana hutang dengan beberapa lembaga penjerat utang seperti JBIC, Bank Dunia dan IMF adalah sebagai berikut : JBIC dari tahun 1968 â€“ 1996 US \$ 8.4467 million, Bank Dunia dari tahun 1973-1997 US \$ 2529 Million dan dengan Asia Development Bank dari tahun 1969 â€“ 1991 sebesar US \$ 69.888.000 million. Inilah warisan rezim orde baru yang mengantarkan kita pada kejatuhan krisis multidimensional yang bisa dirasakan sampai sekarang.

Terang saja tahun 1997 terjadi resesi â€œkolapsâ€ ekonomi kita di pasar makro. Salah satu sebabnya adalah jatuh temponya pembayaran utang luar negeri yang tidak bisa dibayar oleh Indonesia. Karena sekitar 30% (*menurut laporan Bank Dunia*) Â proyek hutang ini di korup disatu sisi. Maupun bunganya yang kelewat tinggi disisi lain dan devisa tidak mencukupi untuk membayar. Apalagi 1/3 APBN kita habis hanya untuk bayar bunga hutang. Belum pokok hutang.

Seperti halnya Waduk Karangates Kab. Malang Jatim, juga hasil hutang luar negeri yang belum lunas sampai sekarang.Â Tahap pencairan hutang meliputi fase sbb: (1). 17 September 1969, sebesar 821 juta dollar AS ; (2). 22 Desember 1969 sebesar 452 Juta Dollar AS ; (3). 28 Agustus 1970 sebesar 1285 juta dollar AS ; (4). 21 Sept 1971 sebesar 515 Juta Dollar AS ; (5). 15 Desember 1973 sebesar 2180 Dollar AS ; (6). 27 Desember 1974 sebesar 743 ; (7). 25 Agustus 1975 sebesar 345 juta dollar AS. Jumlah total 6341 Juta Dollar AS.

Â

Dehumanisasi; Rakyat Diusir Dari Tanah Tinggalnya

Proyek waduk/bendungan selalu membutuhkan lahan yang besar. Ketika tahap proyek memasuki tahap pengerjaan (*pada saat*) dampak yang sering terjadi adalah mereka harus pindah. Hal ini ditimbulkan akibat lahan yang dihuni maupun lahan pertanian yang disekitar proyek akan ditenggelamkan.

Pada titik inilah terjadi migrasi masyarakat dari suatu wilayah ke wilayah lain. Dalam sejarah migrasi pada waktu dulu bisa disebabkan oleh kolonialisme (penjajahan secara fisik) oleh bangsa lain dan "fenomena bencana alam" yang terjadi, seperti gunung meletus misalnya. Tetapi sekarang orang dipaksa migrasi dari tempat asalnya saat masyarakat sekitar tidak kuat menghadapi situasi kekerasan, atau tidak mampu berdaya saing pada perkembangan situasi sosialnya.

Hingga mereka akhirnya memilih urbanisasi, transmigrasi, *bedhol deso*, atau pun migrasi dari ke negara lain. Sebagai
mana data yang terlansir di harian koran nasional
(*Kompas*, 3/10/2006)
, migrasi pada tahun 2005 saja, di antar negara mencapai 190 juta jiwa dan terus meningkat. Sebanyak 115 juta jiwa migran antarnegara
"tinggal di kota-kota maju dan 75 juta jiwa di negara-negara berkembang.

Pada fase post/pasca pengerjaan proyek waduk dan bendungan, dampak serius (*cenderung negatif*) yang sering terjadi adalah azas pemanfaatan dan kontinuitas fungsi waduk/bendungan yang sering mengalami kegagalan. Seperti musim kemarau saat ini beberapa waduk besar di Jatim mengering. Waduk Dawuhan di Kabupaten Madiun yang menjadi ketergantungan pengairan seluas 1.273 ha sawah di sepuluh desa pada bulan September sudah mengering, waduk Pacal di Temayang Kabupaten Bojonegoro juga sudah kering
(*Kompas*, 17/10/2006).
Pada saat seperti inilah dampak terhadap *ecosoc dan fundamental right* rakyat atas air menjadi tidak terpenuhi.

Selain itu apa yang pernah dialami warga Kedungombo, Nipah, adalah potret nyata dampak

negatif. Kejadian serupa diluar negeri pun tidak jauh berbeda. Di India proyek Waduk Narmada mengusir lima belas ribu orang dari tanah tinggalnya dan 20 tahun terakhir diatas 500ribu orang terusir akibat 3000 lebih proyek bendungannya.

Jumlah orang yang jadi pengungsi akibat proyek-proyek waduk, dam/bendungan air diseluruh dunia mencapai lebih dari 2,5 juta orang. Meliputi negara-negara di Afrika seperti Ghana, Nigeria dan negara-negara Asia seperti Thailand, Filipina, Vietnam, China, India, Indonesia dan Amerika Latin seperti Brazil, serta Eropa di Canada (Sumber: *Kertas Posisi WALHI Hak Atas Lingkungan adalah Hak Azasi, 2004*).

Akibatnya disaat itulah mereka yang tidak mempunyai akses terhadap sumber-sumber kehidupan, menjadi "œkere dan gembel" globalisasi kapitalisme. Kebutuhan kesehatan, hidup layak, pendidikan kalah dengan proyek infrastruktur air yang berorientasi pada bangunan fisik, bukan sektor pemenuhan hak dasar warga negaranya.

~ ~ ~ ~ ~ Jika tidak dihentikan, Indonesia sebagai negara kaya SDA akan kembali pada era kolonialisme, dibawah kuasa oligarki "persekutuan" modal yang menjadikan negara dan kekuasaan sebagai alat saja. Maka rakyat makin menderita dan kehilangan harapan hidup. Sehingga mimpi negeri damai, adil, makmur dan sejahtera yang di cita-citakan, akan digantikan dalam keterjajahan, keterpurukan dan ketidakberdaulatan atas sumber-sumber kehidupannya. Realitas kesenjangan telah sedemikian nyata adanya, proyek hutang sekian banyak dikorup dan belum lunas pembayarannya, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi proyek-proyek padat modal telah menjadikan bencana berkelanjutan.

Sebagai manusia yang mestinya bisa belajar dari kekeliruan-kesalahan yang dibuatnya sendiri, masihkah kita mengikuti jalan sesat "agama neo liberal-globalisasi kapitalisme"? Mari menghidupkan kembali syaraf-syaraf "kelembutan empati. Mari menentang segala keserakahan yang berpotensi merugikan dan mengancam keselamatan orang lain. Kita mesti berdaulat atas SDA di negeri sendiri. Ingatlah, bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang memperjuangkannya.

Theme: Pressrow by [Chris Pearson](#) .

~